

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN PARADIGMA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Usaha Aung San Suu Kyi

Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dapat pula dikatakan bahwa usaha adalah sebuah pengharapan yang dilakukan dengan berbagai cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, usaha diartikan sebagai kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai maksud, pekerjaan, perbuatan prakarya dan daya upaya untuk mencapai sesuatu.¹⁰ Menurut W. J. S. Poerwadarminta, usaha merupakan segala kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, maka usaha adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh individu dengan mengerahkan tenaga, pikiran maupun badan untuk mencapai suatu tujuan serta menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hal. 997.

¹¹ W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), Hal. 1136.

Aung San Suu Kyi merupakan tokoh pejuang gerakan revolusi Myanmar dalam melawan rezim totaliter yang berkuasa di negaranya. Garis perjuangannya diilhami oleh falsafah Gandhi yaitu berjuang tanpa kekerasan.¹²

Tanggal 26 Agustus 1988, ketika untuk pertama kalinya Suu Kyi memasuki gelanggang perjuangan, hanya beberapa orang saja yang mengetahui atau mengerti siapa Aung San Suu Kyi dan untuk apa ia berjuang. Seth Mydans dalam *New York Times* mengatakan : "sebelumnya Suu Kyi tidak terlibat dalam politik, tetapi namanya oleh seorang diplomat digambarkan sebagai memiliki "daya tarik" di tengah masyarakat".¹³

Aung San Suu Kyi adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara. Suu Kyi lahir di Pyapon, Delta bagian selatan pada 19 Juni 1945 dari pasangan Aung San dan Daw Khin Kyi.¹⁴ Suu Kyi terlahir sebagai anak dari seorang pahlawan nasional Myanmar yang berjuang dalam memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Akan tetapi kepercayaan rakyat Myanmar terhadapnya bukan hanya semata-mata karena latar belakang keluarganya saja.

Suu Kyi memiliki sejumlah kualitas yang mematangkan dirinya serta pendukungnya dalam arena politik. Pertama, ia cerdas dan terpelajar. Selama limabelas tahun usianya ia bersekolah di Myanmar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Lady Sri Ram College di India. Selanjutnya, ia menempuh pendidikannya di Inggris dan dalam tahun 1967 meraih gelar kesarjanaan di St. Hugh College, Oxford University. Pada tahun 1969, Suu Kyi bekerja di Sekretariat PBB sebagai staf ahli dalam masalah administrasi dan anggaran keuangan. Pada 1987, ia menerima beasiswa dari Indian Institute of Advanced Studies di New Delhi.¹⁵

¹² Ang Chin Geok, *Towards a New Freedom*, .(Sidney: Prentice Hall, 1998), Hal. 19.

¹³ *New York Times*, 26 Agustus 1988.

¹⁴ Ang Chin Geok. *Op cit.* Hal. 1.

¹⁵ Aung San Suu Kyi, *op. cit.* Hal. 376-377.

Perjuangan Aung San Suu Kyi diawali dengan keputusannya untuk masuk ke ranah politik pada tahun 1988. Meskipun hampir dari separuh hidupnya dihabiskan dalam tahanan rumah, namun semangat juangnya masih terus berkobar hingga saat ini. Beliau berjuang baik melalui tindakan, pemikiran yang dituangkan dalam tulisan maupun pembelaan yang ia sampaikan secara langsung.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Aung San Suu Kyi merupakan tokoh pejuang gerakan revolusi dalam melawan rezim totaliter di Myanmar yang memiliki garis perjuangan tanpa kekerasan. Suu Kyi dipercaya sebagai pemimpin gerakan demokrasi bukan hanya karena nama besar ayahnya, yaitu Jenderal Aung San, melainkan kematangan dan kemampuan dirinya dalam membangun semangat juang rakyat Myanmar.

Berkaitan dengan penelitian ini maka usaha Aung San Suu Kyi adalah berupa tindakan, pemikiran serta segala kegiatan yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi dalam upaya menegakkan demokrasi di Myanmar.

2. Konsep Perjuangan Menegakkan Demokrasi

Konsep perjuangan menurut Kansil dan Julianto dalam bukunya yang berjudul *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* menyatakan bahwa perjuangan adalah usaha perintis yang mengantarkan sebuah bangsa ke depan suatu gerbang kemerdekaan dengan segala bentuk pengorbanan-pengorbanannya.¹⁶

¹⁶ Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1984), Hal. 1.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Poerwadarminta yang menyebutkan perjuangan adalah berjuang untuk mengubah sesuatu.¹⁷ G. S. Diponolo juga memberikan definisinya mengenai perjuangan yaitu mengadu kekuatan fisik dan atau mental untuk mencapai tujuan.¹⁸

Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.¹⁹

Sedangkan demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh/untuk rakyat (*demos*). Kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara.²⁰

Henry B. Mayo dalam bukunya yang berjudul "An Democratic Theory" menyatakan sistem pemerintahan yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²¹

Phillipe C. Scmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta bertanggung jawab atas

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), Hal. 424.

¹⁸ G. S. Diponolo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Bina Aksara, 1975), Hal. 234.

¹⁹ S. Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hal.19.

²¹ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1960), Hal. 70.

tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.²²

Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi jika memiliki dua aspek pokok yaitu :

1. Pengakuan HAM sebagai penghargaan atas martabat yang dapat terwujud di dalam tindakan-tindakan pemerintah untuk melindungi HAM;
2. Partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintahan.²³

Indikator demokrasi yang dapat dijadikan pilar demokrasi dalam suatu negara menurut Raymond Gittel adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pemerintahan didukung oleh persetujuan umum (*general consent*);
2. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum atau pemilihan umum;
3. Kepala negara dipilih secara langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum atau bertanggung jawab kepada dewan legislatif;
4. Hak pilih aktif diberikan kepada sebagian besar rakyat atas dasar kesederajatan;
5. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat.²⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjuangan menegakkan demokrasi merupakan usaha yang dilakukan orang atau sekelompok orang didasari dengan niat untuk memperoleh kebebasan dalam kegiatan politik serta partisipasi rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Perjuangan demokrasi yang dimaksud penulis adalah berbagai usaha yang dilakukan Aung San Suu Kyi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Myanmar untuk memperoleh

²² Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), Hal.110.

²³ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2006), Hal: 118.

²⁴

kebebasan dalam kegiatan politik serta berpartisipasi dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintahan Junta Militer yang didasarkan atas persamaan politik.

3. Konsep Demokrasi Myanmar

Myanmar tidak menjadi anggota persemakmuran seperti koloni Inggris kebanyakan. Pemerintahan Myanmar menggunakan sistem federal dengan pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dewan legislatif Myanmar terdiri dari dua kamar, yakni *Amyotha Hluttaw* yaitu Dewan Nasional dan *Pyithu Hluttaw* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah kursi dalam parlemen sebanyak 75% ditentukan melalui pemilihan umum yang dipilih berdasarkan kota serta populasi dan 25% ditunjuk oleh Junta Militer. Pada tahun 1962-1988, legislatif Myanmar hanya terdiri dari *Pyithu Hluttaw* yang seluruh anggotanya diwakili oleh Partai Sosialis.²⁵

Pengadilan tertinggi di Myanmar adalah Mahkamah Agung. Myanmar tidak menerima yuridiksi Mahkamah Internasional. Sistem peradilan Myanmar terbatas, tidak ada jaminan pengadilan publik yang adil.

Pemerintahan Junta Militer mengumumkan menapaki jalan sosialisme dan merampas aset “kelas penghisap” terutama sasarannya etnis Tionghoa, dan melaksanakan kebijakan pintu tertutup.²⁶

Jenderal Ne Win mengeluarkan kebijakan *the Burmese Way to Socialism* sebagai ideologi Myanmar.²⁷ *The Burmese Way to Socialism* digambarkan sebagai anti-Barat, bersikap netral dan sosialis. Kebijakannya berupa menasionalisasi seluruh

²⁵ *Pyidaungsu Hluttaw*, (Online) http://en.wikipedia.org/wiki/Pyidaungsu_Hluttaw

²⁶ *Frozen Democracy Myanmar*, (Online) <http://politikdemokrasi.blogspot.com/2011/06/frozen-democracy-myanmar.html>

²⁷ *Burmese Way to Socialism*, (Online) <http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese-Way-to-Socialism>

perusahaan swasta dengan tujuan pengendalian modal, produksi dan kekayaan oleh negara. Pemerintah miiter memegang kekuasaan secara otoriter dan tidak menyukai adanya campur tangan pihak asing. Politik isolatif tersebut dilakukan untuk menutup Myanmar dari pengaruh dunia luar baik di bidang ekonomi, kebudayaan, maupun politik.

Pada Pasal 158 undang-undang dasar Myanmar disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dengan bebas ikut serta dalam organisasi politik, sosial, dan massa yang diperbolehkan oleh hukum dan untuk menikmati kebebasan berasosiasi dan berkumpul, Negara harus menyediakan bantuan kepada masyarakat untuk membantu mereka dalam menikmati penuh hak-hak dan kebebasan mereka ini.²⁸

Pasal 158 ini menjamin masyarakat untuk berorganisasi baik politik, sosial, maupun massa, tetapi meskipun diperbolehkan dalam berorganisasi, kegiatan politik masih ada batasannya. Sesuai yang dijelaskan dalam pasal 156 huruf c dan pasal 178 huruf a yaitu organisasi keagamaan tidak diijinkan dalam tujuan politik, serta seseorang dalam organisasi atau kelompok keagamaan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun mencalonkan diri dalam pemilu.

Sebuah artikel berjudul “Memperjuangkan Demokrasi” Suu Kyi mengatakan:

“Sang penguasa harus mematuhi ajaran Buddha. Inti dari ajaran-ajaran tersebut ialah konsep kebenaran, keadilan dan kasih sayang. Yang dicari rakyat Myanmar di dalam perjuangan mereka justru adalah pemerintah yang didirikan di atas kualitas-kualitas tersebut.”²⁹

Spirit Aung San Suu Kyi berakar dari pondasi kebudayaan Myanmar yakni agama Buddha tradisional dari Timur. Sedangkan yang menginspirasi spiritualnya ialah Mahatma Gandhi, sang filsuf anti kekerasan India, dan ayahnya sendiri yakni

²⁸ *Constitution of Myanmar*, http://www.thailawforum.com/database1/constmyan_mar5.html).

²⁹ *Burmese Way to Socialism*, *op cit*.

Aung San pemimpin perjuangan kemerdekaan Myanmar. Kepercayaan dan pelaksanaan Aung San Suu Kyi adalah filsafat agama Buddha Mahayana, itu berarti memikul tanggung jawab terhadap segenap makhluk hidup.

B. Kerangka Pikir

Aung San Suu Kyi merupakan salah satu tokoh penggerak reformasi di Myanmar. Suu Kyi aktif dalam memimpin berbagai aksi protes dan demonstrasi menuntut perbaikan dalam sistem pemerintahan. Aksi demonstrasinya yang pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus di depan Pagoda Shwedagon. Perjuangan Suu Kyi merupakan refleksi dari apa yang pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi yaitu protes dengan jalan damai dan tanpa kekerasan demi hak-hak asasi manusia sebagai tujuan utama.

Suu Kyi juga melancarkan aksi mogok makan dalam upaya membebaskan semua pendukungnya dari siksaan tentara militer. Aksi tersebut mendapatkan respon positif dengan pemberian jaminan oleh seorang perwira militer bahwa para pendukungnya tidak akan disiksa dan kasus mereka akan disalurkan melalui proses hukum.

Suu Kyi berjuang dalam wadah perjuangan NLD (*Nation League of Democracy*) atau Liga Nasional untuk Demokrasi. Melalui partai politik inilah Suu Kyi mendapatkan kesempatan untuk mengkampanyekan perjuangan dalam menegakkan kembali demokrasi yang telah lama padam. Meskipun pihak militer mengeluarkan peraturan hukum yang melarang adanya kegiatan politik yang dihadiri lebih dari empat orang.

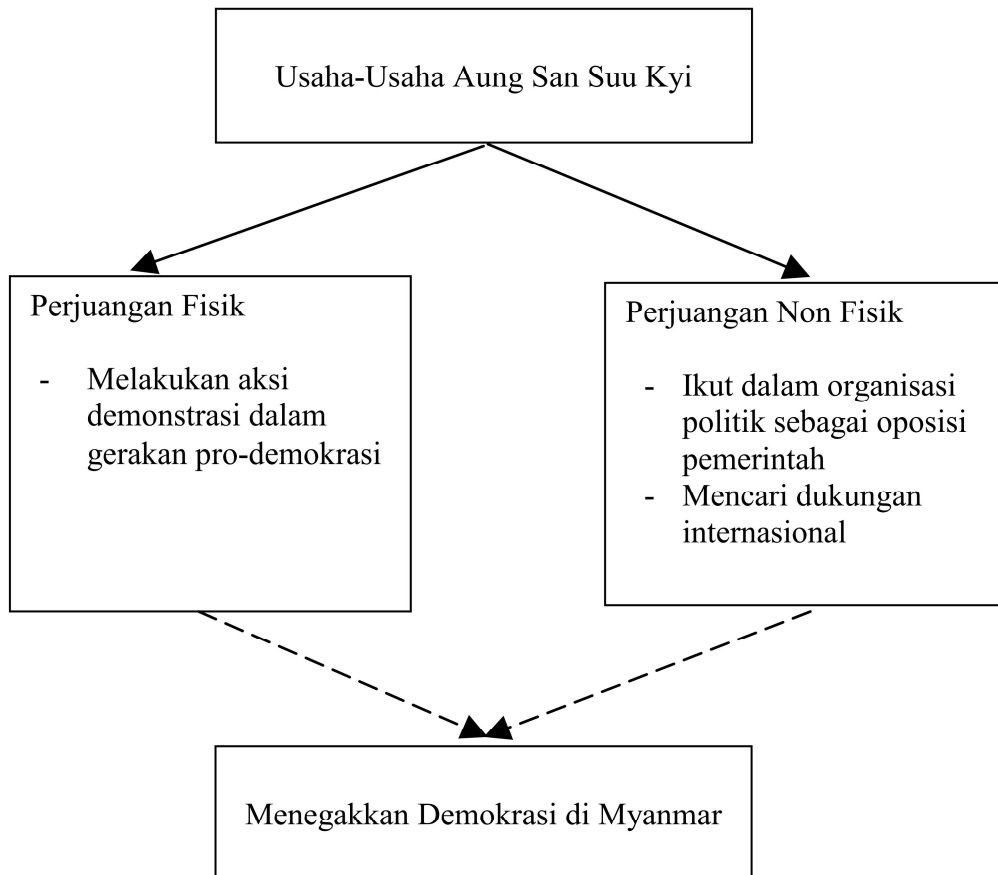
Perjuangan Suu Kyi dalam NLD memperoleh hasil yang mengejutkan ketika partainya memperoleh kemenangan mutlak yaitu lebih dari 80% suara dalam pemilu tanggal 27 Mei 1990 yang dilaksanakan di Myanmar. Namun hasil pemilihan umum tersebut dibatalkan oleh pemerintah militer dan tidak dapat menghentikan monopoli kekuasaan militer. Secara resmi mereka mengumumkan bahwa semua perlawanan terhadap kebijakan pemerintah tetap dilarang.

Aung San Suu Kyi juga aktif dalam menyuarakan pelanggaran HAM di negerinya kepada Komisi PBB untuk masalah HAM dan para duta besar di seluruh dunia agar dapat memberikan perhatian terhadap penindasan dan kekerasan yang dialami rakyat Myanmar. Perjuangannya pun dilakukan melalui tulisan-tulisan sebagai pembangun semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Bentuk keperduannya mengenai nasib rakyat Myanmar dituangkan dalam beberapa tulisan yang terangkum dalam buku *Letters from Burma*.

Atas tindakan-tindakannya, Suu Kyi dianggap telah menentang kekuasaan pemerintah militer. Namun Suu Kyi tetap meneruskan perjuangannya demi tegaknya demokrasi di Myanmar.

C. Paradigma



Keterangan :

—————▶ : **Garis Usaha**

- - - - -▶ : **Tujuan**